



Analisis Dampak dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Stabilitas Inflasi di Indonesia

Farid Maulana^{1*}, Maziyah Farhah², Elmesie Berlentie³, Rasidah Novita Sari⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

221410151.farid@uinbanten.ac.id^{1*}, 221410161.farid@uinbanten.ac.id²,
221410162.elmesie@uinbanten.ac.id³, rasidah.novita@uinbanten.ac.id⁴

Alamat: R5F3+43Q, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: 221410151.farid@uinbanten.ac.id

Abstract; *The development of the National Capital City (IKN) triggers an increase in demand for goods and services, especially in the construction and basic needs sectors, which can cause a spike in regional and national inflation. Monetary policy faces new challenges, including increasing interest rates and the risk of rupiah exchange rate volatility due to dependence on foreign debt financing. These projects also influence economic distribution, creating investment opportunities, but potentially increasing economic inequality. This research emphasizes the importance of coordination between monetary and fiscal to mitigate negative impacts on national economic stability.*

Keywords: *Monetary Policy, IKN Nusantara, Inflation*

Abstrak; Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) memicu peningkatan permintaan barang dan jasa, terutama di sektor konstruksi dan kebutuhan pokok, yang dapat menyebabkan lonjakan inflasi regional dan nasional. Kebijakan moneter menghadapi tantangan baru, termasuk peningkatan suku bunga dan risiko volatilitas nilai tukar rupiah akibat ketergantungan pada pembiayaan utang luar negeri. Proyek ini juga memengaruhi distribusi ekonomi, menciptakan peluang investasi, tetapi berpotensi meningkatkan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memitigasi dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Kata kunci: Kebijakan Moneter, IKN Nusantara, Inflasi

1. PENDAHULUAN

Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade. Sebagai ibu kota negara, kota ini memainkan peran strategis, baik dalam hal politik maupun ekonomi. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang pesat, Jakarta menghadapi berbagai tantangan signifikan. Kepadatan penduduk yang luar biasa dengan lebih dari 57 persen populasi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa menjadikan beban infrastruktur semakin berat. Selain itu, permasalahan lingkungan seperti penurunan permukaan tanah hingga ancaman banjir memperburuk kondisi yang ada. Pada tahun 2050, diperkirakan sekitar 28 persen wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut jika tidak ada upaya mitigasi yang serius.

Dengan berbagai alasan tersebut, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Langkah ini tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum bagi proyek pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara. Pemindahan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada Jakarta sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Kalimantan Timur dipilih karena letaknya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia, ditambah dengan potensi ekologis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun, proyek besar ini tidak terlepas dari berbagai tantangan ekonomi. Salah satu perhatian utama adalah dampaknya terhadap inflasi. Berdasarkan data historis, proyek pembangunan skala besar sering kali memicu peningkatan biaya barang dan jasa, baik secara lokal maupun nasional. Peningkatan permintaan terhadap bahan konstruksi, tenaga kerja, dan infrastruktur lain dapat mendorong kenaikan harga secara signifikan, yang selanjutnya berimplikasi pada kestabilan inflasi. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori inflasi permintaan dan biaya, di mana lonjakan permintaan agregat dan biaya produksi dapat menjadi pemicu utama kenaikan harga.

Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki peran strategis dalam mengelola tekanan inflasi. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai tukar, mengontrol jumlah uang beredar, dan mengatur tingkat suku bunga. Namun, dalam konteks proyek ibu kota baru, tantangan yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, distribusi barang, dan dinamika pasar kerja yang berubah dapat menimbulkan tantangan baru bagi kebijakan moneter nasional.

Selain risiko inflasi, dampak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Pembangunan ibu kota baru dapat memengaruhi pola distribusi ekonomi di daerah sekitarnya. Harga kebutuhan pokok diperkirakan meningkat, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi sentra pembangunan. Hal ini sejalan dengan pengalaman sebelumnya di berbagai proyek infrastruktur besar, di mana kenaikan harga bahan pokok sering kali terjadi akibat perubahan pola distribusi dan tingginya permintaan.

Dalam konteks ini, stabilitas inflasi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan proyek pembangunan ibu kota baru. Jika inflasi tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan meluas, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga gangguan pada investasi nasional. Oleh karena itu, analisis mengenai hubungan antara pembangunan ibu kota baru dan inflasi menjadi sangat relevan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, bagaimana pemindahan ibu kota memengaruhi harga barang dan jasa di Indonesia, serta apa saja risiko terhadap stabilitas inflasi yang muncul dari proyek pembangunan ini. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan moneter yang lebih efektif.

Sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pembangunan, pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Sinergi antara

kebijakan moneter, fiskal, dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mengelola dampak yang timbul. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya mendukung keberhasilan proyek pembangunan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis library research, dimana untuk menganalisis tentang perubahan ibu kota negara, perlu adanya referensi yang terkait baik berupa updating baik koran, majalah atau yang lainnya. Adapun referensi utama (data primer dari beberapa stragnews di berbagai media massa yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara sebagai solusi pembangunan merata dan kesejahteraan, atau boleh dikatakan bahwa penelitian ini yakni penelitian analisis teks media (ATM) yang bersifat non kanchah, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara terhadap stabilitas inflasi di Indonesia. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, seperti berita yang diterbitkan oleh media massa nasional terkait perkembangan pemindahan ibu kota, buku-buku ekonomi yang membahas kebijakan moneter dan inflasi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali hubungan antara aktivitas pembangunan ibu kota baru dengan potensi perubahan tingkat inflasi melalui interpretasi data yang tersedia. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema utama yang berkaitan dengan stabilitas inflasi, seperti peningkatan permintaan barang dan jasa, distribusi logistik, serta dampak terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia.

Tahapan-tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Menentukan tema:** Peneliti fokus pada tema pemindahan ibu kota dan pengaruhnya terhadap stabilitas inflasi negara dengan meninjau data dari berbagai dokumen resmi dan publikasi terkait.
2. **Mengidentifikasi topik menarik:** Peneliti memilih topik dampak dan risiko ekonomi dari pemindahan ibu kota terhadap inflasi, mengingat dampak kebijakan ini dapat meluas ke sektor ekonomi dan sosial.
3. **Merumuskan masalah:** Peneliti merumuskan masalah dengan berfokus pada hubungan antara kebijakan pemindahan ibu kota, distribusi ekonomi, dan dampaknya terhadap stabilitas inflasi. Masalah dirumuskan secara bertahap untuk menciptakan fokus penelitian yang mendalam.
4. **Menentukan metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data dokumentasi dari sumber primer dan sekunder.
5. **Menentukan metode analisis:** Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan triangulasi data untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan

pemindahan ibu kota dan stabilitas inflasi. Peneliti juga mempertimbangkan metode analisis ekonomi, sosial, dan politik.

6. **Melakukan analisis data:** Data dianalisis berdasarkan aspek ekonomi, seperti perubahan struktur biaya, distribusi pendapatan, serta dampak kebijakan terhadap harga barang dan jasa, yang berpotensi memengaruhi inflasi.
7. **Menarik kesimpulan:** Peneliti menyimpulkan temuan penelitian pada tataran teoritis untuk memberikan pandangan konseptual terkait risiko dan dampak kebijakan ini terhadap stabilitas inflasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dokumen secara detail dan mendalam. Dokumen yang dikaji mencakup berita dari media online, laporan kebijakan, jurnal akademik, dan publikasi lainnya. Data sekunder juga diambil dari buku-buku dan literatur akademik yang relevan dengan isu inflasi dan kebijakan pemindahan ibu kota.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif-analitis untuk mengkaji data yang terkumpul. Analisis ini berfokus pada hubungan antara kebijakan pemindahan ibu kota dengan stabilitas inflasi negara, menggunakan kerangka kerja teori ekonomi dan sosial. Pendekatan semiotik digunakan untuk meninjau narasi kebijakan dan dampak sosial-ekonominya, dengan interpretasi terhadap indikator ekonomi yang relevan seperti tingkat inflasi, daya beli, dan distribusi ekonomi antarwilayah.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara terhadap stabilitas inflasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kenaikan Permintaan Barang dan Jasa

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur telah memicu lonjakan signifikan pada permintaan barang dan jasa, terutama di sektor properti, material konstruksi, dan layanan pendukung lainnya. Fenomena ini menunjukkan potensi besar, tetapi juga menimbulkan tantangan serius, khususnya terkait stabilitas harga barang pokok dan tekanan inflasi.

Lonjakan permintaan properti di kawasan penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda merupakan dampak langsung dari proyek ini. Data dari 99 Group mencatat peningkatan permintaan hingga 57% di Balikpapan dan 1% di Samarinda selama 2023. Kenaikan ini tidak hanya melibatkan properti perumahan, tetapi juga tanah dan lahan komersial yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan bisnis baru.

Harga tanah di kawasan Penajam Paser Utara, yang mencakup ring satu IKN, melonjak drastis. Sebelum adanya proyek ini, harga tanah rata-rata Rp100 ribu per meter persegi. Kini, harga tersebut naik menjadi Rp370 ribu hingga Rp670 ribu per meter persegi dan bahkan mencapai Rp1,5 juta di lokasi strategis dekat titik nol IKN. Lonjakan harga ini sebagian besar didorong oleh spekulasi dan tingginya permintaan dari investor dan pengembang properti.

Peningkatan aktivitas pembangunan di IKN juga mendorong permintaan material konstruksi seperti semen, besi, dan kayu. Sebagian besar bahan baku ini masih dipasok dari luar Kalimantan, sehingga biaya logistik yang tinggi turut memengaruhi harga material di pasar lokal. Beban tambahan ini dapat memicu kenaikan biaya konstruksi yang berimbas pada inflasi secara regional dan nasional.

Permintaan jasa konstruksi dan tenaga kerja juga meningkat pesat. Banyak kontraktor mendatangkan tenaga kerja dari luar Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan proyek, karena keterbatasan tenaga lokal yang terampil. Di sisi lain, masyarakat lokal mulai merasakan manfaat ekonomi dari penyewaan tanah dan properti mereka kepada pekerja dan kontraktor, meskipun peningkatan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan baru.

Selain sektor konstruksi, lonjakan permintaan juga terlihat pada layanan pendukung seperti transportasi dan logistik. Infrastruktur utama seperti jalan tol dan pelabuhan di kawasan IKN terus diperluas untuk mengakomodasi arus barang dan jasa yang meningkat. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif ini membutuhkan perencanaan distribusi yang efisien untuk menghindari gangguan pasokan barang esensial.

Di sisi lain, proyek IKN memberikan peluang besar bagi pengembang perumahan dan properti komersial. Kawasan sekitar IKN, seperti Nenang dan Balikpapan, diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru yang menarik investasi jangka panjang. Namun, kenaikan harga properti yang tidak terkendali dapat membatasi akses masyarakat lokal terhadap hunian yang terjangkau, menciptakan kesenjangan ekonomi baru di kawasan tersebut.

Dalam konteks makroekonomi, lonjakan permintaan barang dan jasa akibat pembangunan IKN mencerminkan tantangan dan peluang yang seimbang. Dengan kebijakan yang tepat, seperti pengendalian harga dan insentif bagi produsen lokal, dampak negatifnya dapat diminimalkan. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

B. Dampak pada Konsumsi dan Sektor Riil

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memengaruhi konsumsi domestik di kawasan Kalimantan Timur, khususnya di wilayah sekitar Penajam Paser Utara

dan Kutai Kartanegara. Kegiatan pembangunan besar-besaran meningkatkan kebutuhan barang dan jasa secara signifikan. Kenaikan konsumsi ini tidak hanya berasal dari kebutuhan material dan layanan konstruksi, tetapi juga kebutuhan sehari-hari dari tenaga kerja yang bertambah pesat di kawasan tersebut.

Meningkatnya aktivitas ekonomi ini menciptakan inflasi berbasis permintaan (demand-pull inflation), terutama pada barang konsumsi utama seperti bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini terlihat dari peningkatan harga kebutuhan dasar di sekitar IKN. Dengan meningkatnya daya beli sementara dari pekerja konstruksi, konsumsi masyarakat lokal ikut terdorong. Namun, hal ini dapat memperburuk kesenjangan akses ekonomi karena harga yang semakin tinggi tidak selalu terjangkau oleh masyarakat lokal.

Salah satu tantangan besar dari pembangunan ini adalah distribusi barang ke wilayah baru. Sistem logistik di Kalimantan Timur saat ini masih berkembang, dan infrastruktur distribusi barang sering kali menghadapi kendala. Keterbatasan jalur transportasi darat dan biaya logistik yang tinggi menjadi hambatan dalam memastikan kelancaran suplai barang ke wilayah sekitar IKN.

Masalah distribusi ini berdampak pada kenaikan harga barang. Ketergantungan pada pasokan dari luar Kalimantan membuat harga barang-barang esensial seperti bahan pangan, material konstruksi, dan bahan bakar meningkat lebih cepat dibandingkan kawasan lain di Indonesia. Sebagai contoh, harga tanah dan properti di kawasan sekitar IKN telah melonjak drastis, yang juga memengaruhi biaya pembangunan infrastruktur perumahan dan komersial.

Di sisi lain, sektor riil di sekitar IKN menunjukkan pertumbuhan. Lonjakan permintaan terhadap barang dan jasa menciptakan peluang usaha baru, khususnya di sektor perdagangan lokal dan layanan pendukung. Namun, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi lokal agar kawasan tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada barang impor. Jika tidak, inflasi yang disebabkan oleh gangguan pasokan barang dapat semakin meluas.

Selain itu, konsumsi domestik yang meningkat juga memengaruhi dinamika sosial-ekonomi di kawasan IKN. Masyarakat lokal mulai beradaptasi dengan pola konsumsi baru yang didorong oleh aktivitas ekonomi proyek pembangunan. Namun, tanpa regulasi yang memadai, risiko ketimpangan antara pendatang dan penduduk asli semakin besar. Pemerintah perlu mengantisipasi hal ini dengan memperbaiki infrastruktur logistik dan meningkatkan kapasitas produksi barang lokal.

Secara keseluruhan, meskipun proyek IKN memicu pertumbuhan sektor riil dan konsumsi domestik, risiko inflasi berbasis permintaan dan gangguan logistik menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Kebijakan pemerintah yang terintegrasi, termasuk pengembangan infrastruktur logistik dan insentif bagi produsen lokal, sangat diperlukan

untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di kawasan IKN.

C. Pengaruh Terhadap Harga Komoditas Lokal

Harga yakni sejumlah uang ditagihkan atas hasil interaksi terkait jual/beli atas produk agar konsumen memperoleh hak milik atas produk barang maupun jasa yang ditukarkan. Harga komoditas pangan merupakan suatu nilai tukar dalam satuan moneter yang ditetapkan atas suatu barang komoditas pangan seperti beras, daging ayam, telur, cabai merah serta bawang merah. Harga yang terbentuk atas hasil persetujuan dengan penjual dan pembeli menciptakan perubahan harga yang berpengaruh akibat permintaan dan penawaran. Namun untuk bahan makanan itu sendiri, harga lebih bergantung pada penawaran, oleh karena itu permintaan menjadi lebih setimbang sebagai akibat dari pergerakan pasar.

Menurut Setiawan & Hadianto (2019) menjabarkan tentang harga komoditas dibentuk menjadi leading indicators dalam membentuk inflasi, akibatnya harga komoditas dapat bereaksi dengan cepat terhadap guncangan di seluruh perekonomian, seperti permintaan agregat. Alasan lainnya harga komoditas juga dapat merespon noneconomic shock contohnya bencana alam dimana pendistribusian komoditas tersebut menjadi terhalang.

Perpindahan pusat pemerintah ke Pindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mengembangkan perdagangan antardaerah di Indonesia khususnya provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Selain itu, bisa mengembangkan perdagangan antardaerah, terutama perdagangan antara pulau Jawa serta Kalimantan, sehingga terbentuk nilai ekonomi yang lebih maju. Perpindahan ibu kota baru ini akan lebih optimal jika didukung oleh produktivitas, inovasi, serta teknologi yang baik. Perpindahan ibu kota negara juga akan mendesak investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, perpindahan ibu kota akan memberikan dorongan investasi yang lebih luas pada daerah lain dan dapat meningkatkan output (Giating Khoiriamal et al., 2022).

Pemindahan ibu kota akan menimbulkan tambahan inflasi nasional minimal 0,3% meskipun nantinya tekanan dari sisi permintaan akan meningkat. Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan disposable populasi, yang kemungkinan akan tercermin dalam harga barang-barang dasar. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya. Diharapkan juga persiapan infrastruktur yang lebih baik serta sektor produksi yang relatif bermacam-macam. Tentunya dalam pembangunan ibu kota baru tersebut pastinya bakal menarik banyak tenaga kerja baru sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan. Kesempatan dari warga sekitar serta investor merupakan salah satu manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung. Diharapkan nantinya akan banyak para investor yang menginvestasikan saham mereka di wilayah yang terkena dampak

Dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 10–15 tahun, konsumsi bahan pokok lokal di daerah sekitar IKN diproyeksikan meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena IKN akan menjadi pusat aktivitas baru yang melibatkan jumlah penduduk besar, termasuk pekerja konstruksi, aparat sipil negara (ASN), hingga personel TNI-Polri. Beberapa poin penting terkait pengaruh ini adalah:

1. Meningkatkan Permintaan terhadap Komoditas Lokal

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya suplai pangan dari daerah sekitar IKN, seperti Kalimantan Timur dan kabupaten/kota di sekitarnya. Permintaan tinggi terhadap komoditas lokal seperti beras, sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lain akan berdampak langsung pada harga. Ketika permintaan meningkat dengan kapasitas suplai yang tetap atau belum cukup optimal, maka harga komoditas lokal berpotensi mengalami kenaikan.

2. Stabilitas Harga Regional dan Nasional

Presiden juga menyatakan bahwa apabila kebutuhan pangan IKN tidak mencukupi dari Kalimantan Timur, suplai harus didatangkan dari provinsi lain. Langkah ini dapat meningkatkan biaya logistik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga bahan pokok secara regional hingga nasional. Selain itu, tekanan terhadap suplai dari provinsi lain dapat menciptakan gangguan harga di wilayah asal, sehingga perlu strategi alokasi sumber daya yang efisien.

3. Manfaat Ekonomi bagi Daerah Sekitar

Peningkatan konsumsi bahan pokok lokal di IKN juga memberikan peluang ekonomi bagi daerah sekitarnya. Kabupaten-kabupaten di Kalimantan Timur, seperti Paser dan Penajam Paser Utara, dapat mengembangkan sektor agribisnis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini akan mendukung stabilitas pasokan dan harga di tingkat lokal.

4. Risiko Inflasi Lokal

Jika kapasitas produksi tidak ditingkatkan sesuai dengan permintaan yang bertumbuh, risiko inflasi lokal dapat terjadi. Komoditas pokok yang menjadi bahan konsumsi utama, seperti beras dan sayur, akan mengalami lonjakan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat di sekitar IKN. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan harga, subsidi, atau dukungan kepada petani lokal menjadi sangat krusial.

5. Strategi Ketahanan Pangan

Untuk mengantisipasi lonjakan harga akibat permintaan tinggi, pengelolaan lahan pertanian di sekitar IKN, seperti yang direkomendasikan oleh Kadin Kalimantan Timur, menjadi solusi jangka panjang. Dengan memberdayakan lahan di kabupaten seperti Penajam Paser Utara, kebutuhan pangan lokal dapat dipenuhi secara lebih mandiri, mengurangi ketergantungan pada suplai dari Jawa dan Sulawesi, sekaligus menjaga stabilitas harga.

Dari perspektif ekonomi, Kalimantan Timur masih bergantung pada minyak bumi, gas alam, dan pertambangan batu bara. Penurunan produksi di sektor migas dan batu bara berdampak pada sektor lain, terutama jasa dan perdagangan, yang mempengaruhi perekonomian Kalimantan Timur. Sektor kehutanan belum sepenuhnya mengoptimalkan produktivitas kawasan yang telah dialokasikan untuk hutan produksi. Saat ini, hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, terutama kelapa sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).

Dengan meningkatnya konsumsi bahan pokok lokal di sekitar IKN akibat aktivitas pembangunan dan pertumbuhan populasi, terjadi peningkatan permintaan yang berpotensi mendorong harga komoditas lokal, sehingga ini dapat mempengaruhi stabilitas harga regional dan nasional.

D. Risiko Kebijakan Moneter Akibat Pemindahan Ibu Kota

1. Tekanan pada Suku Bunga

Pemindahan ibu kota ini tampaknya hanya berlaku pada pusat pemerintahan, akan tetapi tidak dengan kegiatan bisnisnya. Perangkat pemerintahan yang bakal ikut boyongan ke ibu kota yang baru adalah kementerian/ lembaga, MPR, DPR, DPD, yudikatif, dan sektor keamanan, seperti Kepolisian dan TNI.

Lembaga keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap berdomisili di DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sepertinya nanti akan diproyeksikan sebagai pusat keuangan dan kegiatan bisnis di Indonesia. Tidak ikut pindahnya beberapa lembaga keuangan tersebut ke ibu kota yang baru secara logika memang bisa dipahami. Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM berada di luar struktur pemerintahan. Hubungan kerja dengan pemerintah terjalin dalam format koordinasi, alih-alih bersifat hierarkikal. Pertimbangan dalam tataran praktis pun juga mengamini. Sektor bisnis memerlukan dukungan lembaga keuangan.

Bagi otoritas keuangan, jarak geografis yang besar juga menimbulkan persoalan tersendiri. Kebijakan yang diimplementasikan otoritas terkait (sebagai prinsipal) menuntut keterlibatan penuh lembaga keuangan (sebagai agen). Rentang kendali yang lebar menyebabkan kebijakan finansial menjadi tidak lagi efektif.

Lalu, apa makna yang paling fundamental atas perpindahan ibu kota Republik Indonesia (RI) dari perspektif sektor moneter pada umumnya dan sektor finansial pada khususnya? Apakah tidak ikut pindahnya Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BKPM menyebabkan pusat daya tarik (*centre of gravity*) tetap berada di provinsi DKI Jakarta?

Jawaban atas pertanyaan tersebut merujuk kembali pada fungsi lembaga keuangan itu sendiri. Lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yakni menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana adalah pebisnis yang hendak berinvestasi mengembangkan usahanya.

Oleh karenanya, sangat masuk nalar apabila lembaga keuangan senantiasa akan mendekati, baik lokasi usahanya maupun lokasi pebisnis berdomisili. Alhasil, lembaga keuangan dan perusahaan cenderung mengumpul di lokasi yang sama, entah itu klaster dalam skala kecil atau aglomerasi dalam skala besar.

Pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara menciptakan tantangan baru dalam kebijakan moneter, terutama dalam pengelolaan inflasi yang timbul dari peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah baru. Pembangunan infrastruktur besar-besaran dan peningkatan populasi di IKN Nusantara dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa secara signifikan. Kenaikan permintaan ini, jika tidak diimbangi oleh peningkatan pasokan, berpotensi menyebabkan inflasi.

Dampak pada Penyesuaian Suku Bunga

Sebagai respon terhadap tekanan inflasi, Bank Indonesia (BI) kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuan. Tujuannya adalah untuk menekan laju inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi melalui peningkatan biaya pinjaman. Namun, kebijakan ini memiliki risiko:

- 1. Pengurangan Daya Tarik Investasi**

Kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal bagi pelaku usaha. Hal ini dapat mengurangi minat investor, terutama di sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit, seperti properti dan manufaktur. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah baru bisa melambat, meskipun ibu kota dipindahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan.

- 2. Ketimpangan Regional**

Meskipun ibu kota pindah, pusat keuangan tetap berada di Jakarta. Ketidaksesuaian lokasi antara pusat kebijakan moneter dan aktivitas bisnis utama dapat mempersulit respons kebijakan. Sebagai contoh, jika inflasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya tetap terkendali, tetapi inflasi meningkat signifikan di IKN Nusantara, maka kebijakan suku bunga yang diterapkan secara nasional mungkin tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan inflasi di lokasi tertentu.

- 3. Efek Spillover pada Ekonomi Nasional**

Peningkatan suku bunga untuk mengontrol inflasi di IKN Nusantara dapat berdampak lebih luas pada ekonomi nasional. Pelaku usaha di wilayah lain mungkin juga terdampak oleh kenaikan biaya pinjaman, meskipun inflasi di daerah mereka tidak setinggi di IKN Nusantara. Hal ini berpotensi memperlambat pemulihan atau pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

4. **Resiko Lingkaran Kebijakan**

Jika inflasi tetap tinggi meskipun suku bunga dinaikkan, BI mungkin akan menghadapi tekanan untuk terus menaikkan suku bunga lebih tinggi. Namun, hal ini dapat memperburuk situasi investasi dan mendorong perlambatan ekonomi lebih lanjut. Kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan yang melambat dapat memicu stagflasi, yaitu kondisi ekonomi yang sulit untuk diatasi.

Alternatif Kebijakan

Untuk memitigasi risiko tersebut, Bank Indonesia dan pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan tambahan seperti:

- **Stimulasi Penawaran**

Pemerintah dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi di IKN Nusantara melalui insentif investasi dan penguatan logistik.

- **Kebijakan Moneter Selektif**

Menyesuaikan kebijakan moneter yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, seperti menerapkan kebijakan yang mendukung sektor-sektor tertentu di IKN tanpa harus menaikkan suku bunga secara nasional.

- **Koordinasi yang Lebih Kuat**

Dengan lembaga seperti OJK dan BKPM tetap berada di Jakarta, penting untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga agar kebijakan yang diterapkan konsisten dan efektif, baik di pusat bisnis maupun ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota adalah langkah besar yang membutuhkan kebijakan moneter dan fiskal yang terintegrasi agar dampak negatif, seperti penurunan investasi dan inflasi yang tidak terkendali, dapat diminimalkan.

2. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

Jika pembangunan IKN sebagian besar dibiayai melalui utang luar negeri, seperti yang disebutkan dalam dokumen bahwa anggaran pembangunan termasuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), maka impor barang modal yang tinggi bisa menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, risiko inflasi impor meningkat (imported inflation), yang dapat memengaruhi harga barang dan jasa secara keseluruhan di Indonesia.

Pemindahan ibu kota dengan pembiayaan dari utang luar negeri berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar rupiah, terutama jika kebutuhan impor barang modal sangat besar. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih rinci terkait risiko volatilitas nilai tukar rupiah dan dampaknya pada stabilitas ekonomi:

1. Tekanan pada Neraca Pembayaran

Ketika impor barang modal meningkat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN, aliran devisa keluar juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan defisit transaksi berjalan (*current account deficit*) yang lebih besar. Jika defisit ini tidak diimbangi oleh aliran masuk investasi asing langsung (FDI) atau devisa lainnya, nilai tukar rupiah akan cenderung melemah.

2. Risiko Melemahnya Rupiah

Pelemahan rupiah membuat barang impor menjadi lebih mahal, termasuk barang modal dan bahan baku. Hal ini meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan domestik yang mengandalkan bahan impor, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi impor (*imported inflation*). Imported inflation akan berdampak pada harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat menurun.

3. Ketergantungan pada Utang Luar Negeri

Jika utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan IKN dominan dalam mata uang asing, maka fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan beban pembayaran utang. Biaya cicilan dan bunga utang akan lebih mahal jika rupiah melemah, yang pada akhirnya dapat membebani anggaran pemerintah.

4. Dampak pada Stabilitas Ekonomi Makro

Melemahnya nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik, terutama jika investor asing kehilangan kepercayaan pada stabilitas ekonomi Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan:

- Penarikan investasi portofolio oleh investor asing, memperburuk tekanan pada rupiah.
- Meningkatnya persepsi risiko negara (*country risk*), sehingga biaya pinjaman internasional untuk proyek-proyek lain di masa depan menjadi lebih tinggi.

Solusi dan Strategi Mitigasi

Untuk mengurangi dampak negatif dari volatilitas nilai tukar rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Diversifikasi Pembiayaan Proyek

- Mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dengan menggalang sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*).
- Memanfaatkan investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) yang lebih stabil dibandingkan utang jangka pendek.

2. Penguatan Cadangan Devisa

Bank Indonesia dapat memperkuat cadangan devisa sebagai tameng untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Cadangan devisa yang cukup memberikan ruang bagi BI untuk melakukan intervensi di pasar valas guna menstabilkan rupiah saat terjadi tekanan.

3. Peningkatan Ekspor

Pemerintah dapat mendorong peningkatan ekspor, terutama dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, manufaktur, dan komoditas, untuk mengimbangi

lonjakan impor. Hal ini dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dan mendukung stabilitas nilai tukar.

4. **Hedging Risiko Nilai Tukar**

Lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas proyek IKN dapat menggunakan instrumen hedging seperti kontrak forward atau swap untuk melindungi nilai tukar terhadap fluktuasi yang tajam.

5. **Kerjasama Regional**

Memperkuat kerjasama ekonomi regional, seperti dalam skema ASEAN+3, untuk mendapatkan dukungan stabilisasi keuangan melalui fasilitas seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM).

Risiko-risiko ini menunjukkan pentingnya perencanaan kebijakan ekonomi yang matang untuk mengantisipasi dampak moneter dari pemindahan ibu kota. Hal ini termasuk strategi fiskal yang mendukung, diversifikasi pembiayaan proyek, serta kebijakan moneter yang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah transisi tersebut

E. Risiko Fiskal terhadap Moneter

Akibat Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota. Namun, proses ini tidak lepas dari risiko fiskal yang signifikan, terutama mengingat total anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian besar dana ini akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (APBN) serta melalui skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alokasi fiskal yang besar ini dapat menyebabkan tekanan terhadap stabilitas moneter, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sejalan. Selain itu, ketergantungan pada pembiayaan utang untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur IKN berpotensi meningkatkan risiko default dan mempengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko fiskal yang timbul dari pemindahan IKN dapat berdampak negatif pada nilai tukar rupiah dan suku bunga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta iklim investasi di negara ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang komprehensif dalam mengelola risiko fiskal dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas moneter yang menjadi fondasi perekonomian nasional.

Kenaikan Beban Fiskal dan Dampaknya pada Likuiditas

Kenaikan beban fiskal yang disebabkan oleh pengeluaran besar untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dapat memberikan dampak signifikan terhadap likuiditas nasional. Dalam upaya untuk menutupi kekurangan anggaran, pemerintah sering kali mengandalkan penerbitan obligasi sebagai salah satu solusi. Hal ini berpotensi

meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar, sehingga menciptakan likuiditas yang lebih tinggi. Namun, jika peningkatan likuiditas ini tidak diimbangi dengan kebijakan moneter yang ketat, maka dapat muncul tekanan inflasi yang merugikan perekonomian. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, ketergantungan pada penerbitan obligasi juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat berdampak pada suku bunga dan investasi jangka panjang. Penting bagi pemerintah untuk merencanakan pengeluaran dengan hati-hati dan memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung agar dampak negatif terhadap likuiditas dan stabilitas ekonomi dapat diminimalisir.

Potensi Ketergantungan pada Utang

Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada utang, pemerintah perlu waspada terhadap potensi risiko dan dampak negatifnya terhadap keberlanjutan keuangan publik. Peningkatan utang dapat memberikan dana yang diperlukan untuk proyek jangka panjang, karena setiap pinjaman akan memerlukan pembayaran bunga dan utang pokok. Hal ini dapat menyebabkan ruang fiskal yang semakin terbatas, yang pada akhirnya dapat mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan hati-hati keputusan untuk meningkatkan utang, serta memastikan bahwa penggunaan dana yang dipinjamkan efisien dan efektif. Diversifikasi sumber pendanaan, pengelolaan utang yang baik, dan pengembangan strategi pengurangan risiko merupakan langkah-langkah yang penting dalam mengelola ketergantungan pada utang secara berkelanjutan. Dengan berkurangnya kapasitas pemerintah untuk menangani tantangan ekonomi lainnya, seperti pengangguran dan inflasi, ketergantungan pada utang dapat menciptakan siklus berbahaya yang sulit untuk diputus.

Efek Multiplier pada Inflasi Regional

Ketika pemerintah menginvestasikan dana untuk proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi, terdapat potensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Pendapatan yang lebih tinggi dapat mendorong daya beli dan konsumsi, sehingga menciptakan permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa. Namun, jika peningkatan pendapatan ini tidak diimbangi dengan kapasitas produksi yang memadai, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi seperti ini, permintaan yang meningkat dapat memicu inflasi berbasis permintaan, di mana harga barang dan jasa naik akibat tekanan dari konsumen yang lebih mampu. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas produksi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat tanpa menciptakan dampak inflasi yang merugikan. Penataan kebijakan yang holistik dan terintegrasi akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas.

F. Upaya Pengendalian Inflasi oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas inflasi, terutama dalam konteks pelaksanaan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara. Dalam menghadapi tantangan inflasi yang mungkin timbul akibat proyek besar ini, BI dapat mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, BI dapat mengoptimalkan kebijakan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi dengan cara menyesuaikan suku bunga acuan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan inflasi yang terjadi. Selain itu, BI juga bisa memperkuat pengawasan terhadap sektor moneter dan keuangan guna memastikan likuiditas yang cukup di pasar, yang pada gilirannya dapat mencegah gejolak harga.

Langkah lain yang dapat diambil adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan operasional. BI memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan operasional ekonomi moneter, terutama dalam mengoptimalkan instrumen-instrumen moneter seperti kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka (open market operation) untuk mengontrol jumlah uang beredar di pasar. Dengan menyesuaikan suku bunga acuan, BI dapat secara signifikan memengaruhi perilaku investasi dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya membantu dalam pengendalian inflasi. Dalam konteks ini, kebijakan BI tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan ekonomi global dan domestik.

Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penerapan strategi yang tepat untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di mana pengelolaan inflasi dan stabilitas moneter menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui langkah-langkah yang terencana dan responsif, BI berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, sehingga dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi perekonomian Indonesia di masa depan.

1. Kerjasama dengan pemerintah

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) membawa tantangan baru dalam hal distribusi barang kebutuhan pokok. Koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah diperlukan untuk memastikan kelancaran pasokan. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur logistik guna mengurangi biaya distribusi yang dapat memicu kenaikan harga. Di sisi lain, BI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter yang terkoordinasi, sehingga inflasi tetap terkendali meskipun ada perubahan signifikan dalam pola distribusi akibat pemindahan IKN. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif, diharapkan dampak negatif dari perpindahan ibu kota dapat diminimalisir dan perekonomian nasional tetap stabil serta berkembang.

2. Monitoring dan Proyeksi Inflasi Regional

BI perlu memonitor harga di wilayah IKN secara lebih intensif untuk mengidentifikasi tekanan inflasi lokal sejak dini. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui survei harga konsumen dan indikator inflasi lainnya, yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika harga di wilayah tersebut. Dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi akibat peningkatan permintaan dan pergeseran ekonomi yang terjadi seiring dengan pembangunan infrastruktur dan migrasi penduduk, proyeksi inflasi yang akurat menjadi kunci.

Dengan informasi yang tepat, BI dapat merancang kebijakan yang sesuai untuk merespons perubahan dinamika ekonomi di IKN, termasuk pengendalian inflasi yang mungkin timbul akibat perpindahan ibu kota. Hal ini tidak hanya akan membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di wilayah baru ini. Dengan demikian, melalui langkah-langkah yang proaktif dan terencana, BI dapat berperan penting dalam memastikan bahwa transisi ke IKN tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Dalam upaya ini, BI dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kestabilan harga. Program edukasi ini bertujuan untuk mengurangi spekulasi harga yang sering kali terjadi di pasar, yang dapat memicu inflasi dan mengganggu keseimbangan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dinamika pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dalam menjaga kestabilan harga.

Selain itu, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah juga dapat mempromosikan praktik efisiensi pasar, sehingga pelaku usaha dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Melalui langkah-langkah strategis ini, BI tidak hanya berkontribusi dalam pengendalian inflasi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah IKN.

4. KESIMPULAN

Tujuan strategis dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa. Namun, proyek ini berdampak besar pada stabilitas inflasi Indonesia. Inflasi di tingkat regional dan nasional telah meningkat akibat permintaan barang dan jasa yang tinggi, terutama di bidang properti, konstruksi, dan kebutuhan pokok. Tingginya biaya logistik, yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan material konstruksi, serta ketergantungan pada pasokan dari luar Kalimantan, merupakan penyebab utama inflasi ini.

Selain itu, harga tanah dan properti di daerah sekitar IKN terus meningkat, yang membuat semakin sulit bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan hunian yang terjangkau

dan memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Inflasi berbasis permintaan, yang juga dikenal sebagai inflasi pull-demand, didorong oleh peningkatan daya beli pekerja konstruksi dan peningkatan konsumsi di wilayah IKN. Inflasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan harga jika tidak diimbangi dengan kapasitas produksi lokal yang memadai.

Dari perspektif moneter, inisiatif ini menghadirkan sejumlah masalah yang kompleks. Ini termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan ketidakpastian nilai tukar rupiah akibat ketergantungan pada pembiayaan asing. Efektivitas kebijakan moneter dapat berkurang akibat ketidakseimbangan lokasi antara pusat pemerintahan di IKN dan pusat bisnis serta lembaga keuangan di Jakarta. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko ini dapat memengaruhi daya beli masyarakat, memperlambat investasi, dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih besar.

Sebaliknya, pemindahan IKN juga membuka peluang besar untuk membangun pusat ekonomi baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan mendorong investasi jangka panjang. Namun, jika dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan yang berfokus pada penguatan infrastruktur, stabilitas harga, dan pemberdayaan masyarakat lokal, proyek ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih merata. Pemindahan IKN akan berhasil jika pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi untuk mengatasi inflasi. Dengan langkah yang tepat, proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, S., Nugraha, A. A., Sukron, A., & Rohmah, F. (2023). Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10-18.
- Andhika Nurul Wahidah, Sandy Leo, Vinca R. Y., Rani Gustia. (2024). *Memperkirakan pengaruh pemindahan ibukota negara terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur*. JEKOP Kemakmuran Hijau : Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 1, Issue 2.
- Aprilia, Delvi & Supentri. (2024). *Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Perekonomian Di Indonesia*. Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No. 3.
- Awalunnisa, Y., Aditiya, R., Ainun, A. N., Sepkamala, D. D., & Mawar, M. (2023). PERANAN PEMERINTAH DALAM STABILISASI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 621-626.
- Baehaki, A., Al Mutawali, M. D. I., & Sitio, O. N.(2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Keuangan Negara.

- Chandra, H. P. (1999). HUBUNGAN ANTARA BIAYA KONSTRUKSI BANGUNAN DENGAN INFLASI Studi Kasus Berbagai Tipe Bangunan di Jawa Timur 1993-1998. *Civil Engineering Dimension*, 1(2), 92-102.
- Chintia, Rizka Angelina & Destiningsih, Rian. (2022). *Pengaruh Harga Komoditas Pangan terhadap Inflasi di Kota Semarang*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Volume 27 No. 2.
- Ernanto, B. (2023, 11 13). Permintaan Properti di Kawasan IKN makin Meningkat. Retrieved from [mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/nusantara/629236/permintaan-properti-di-kawasan-ikn-makin-meningkat](https://mediaindonesia.com/nusantara/629236/permintaan-properti-di-kawasan-ikn-makin-meningkat)
- Haryo Kuncoro. Sisi Moneter Pemindahan Ibu Kota Negara RI. Diakses pada 27 November melalui <https://investor.id/opini/195570/sisi-moneter-pemindahan-ibu-kota-negara-ri>
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183-203.
- Hendi. (2024, 9 19). *Harga Tanah di Sekitar IKN Melonjak Drastis 70 Kali Lipat, Efek Pembangunan Ibu Kota Nusantara!* Retrieved from [Rumah123: https://www.rumah123.com/ikn/harga-tanah-di-sekitar-ikn-melonjak-drastis/](https://www.rumah123.com/ikn/harga-tanah-di-sekitar-ikn-melonjak-drastis/)
- Hindiawati, W. (2024). PROBLEMATIK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM. *Perspektif*, 29(1), 36-45.
- Insani, F., Yuni, I. D., & Harahap, I. (2023). Kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi (peran bank sentral). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2).
- Presiden Jokowi minta daerah sekitar IKN sokong kebutuhan pangan*. Diakses pada tanggal 27 November 2024 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4358591/presiden-jokowi-minta-daerah-sekitar-ikn-sokong-kebutuhan-pangan>
- Reni, R.A., dan Siti Aisa. 2020. *Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di Indonesia*. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V No. 1, halaman 183.
- Saiyed, R. (2021). Pengendalian inflasi, moneter dan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 5(1), 42-49.
- Siti Amila, A. A Nugraha, A. Sukron, F. Rohmah. (2023). *Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia*. *Jurnal Sahmiyya*. Vol 2, No 1.
- Tasya, N. (2024). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 122-132.

